

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, ideologi cenderung menjadi istilah negatif yang terutama digunakan untuk mengelompokkan ide-ide yang bias dan/atau ekstrem. Sehingga, “lawan” dianggap memiliki ideologi, sementara “kita” dicirikan dengan prinsip, pragmatisme, atau akal sehat. Begitu juga dalam dunia akademis ideologi digunakan dengan cara seperti itu, walaupun pada umumnya pendekatan-pendekatan akademis lebih dicirikan oleh keagamaan.<sup>1</sup>

Secara teoritik, topik tulisan ini akan banyak bersentuhan dengan gagasan-gagasan mengenai ideologi. Cukup banyak literatur yang membahas mengenai konsep Ideologi itu sendiri. Ideologi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern diartikan sebagai asas pendapat, keyakinan yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan. Dalam kamus istilah pengetahuan populer ideologi diartikan sebagai suatu cita-cita yang merupakan dasar salah satu sistem politik, faham, kepercayaan dan seterusnya.<sup>2</sup>

Sementara dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian mengenai ideologi. Pengertian ideologi yang dimaksud adalah pengertian ideologi secara fungsional dan secara structural. Secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang

---

<sup>1</sup> Robert Eatwell dan Anthony Wright, *Ideologi Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 128

kebaikan bersama, atau tentang masyarakat dan Negara yang dianggap paling baik. Sedangkan ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.<sup>3</sup>

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial-politik.<sup>4</sup> Ideologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasikan secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode pencapaiannya. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam hal ini, manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup.

Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara “keyakinan” dan “Utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 32-33

<sup>4</sup> Platform Kebijakan Pembangunan Golkar, 30

<sup>5</sup> *ibid*, 30-31

Dalam arti fungsional, ideologi digolongkan secara tipologi dengan beberapa tipe yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Suatu ideologi digolongkan sebagai doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, didoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau oleh aparat pemerintah. Sedangkan ideologi digolongkan sebagai ideologi pragmatis jika ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi itu tidak didoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem sosial. Contoh dari ideologi ini adalah ideologi liberalisme.<sup>6</sup>

## **B. Ideologi Politik Partai Golkar**

Ideologi Partai Golkar adalah Pancasila, sebagaimana dituangkan pada Pasal 5 AD/ART Partai Golkar, bahwa “Partai Golkar berasaskan Pancasila”. Dalam pandangan Partai Golkar, Pancasila adalah ideologi, falsafah, dan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila bukan ideologi yang dogmatik, tertutup/statis, melainkan ideologi yang hidup, terbuka dan dinamis, yang mampu menyerap dan merespon berbagai dinamika, tantangan/tuntutan dan perubahan (serta dalam konteks menyikapi reformasi, Golkar dengan paradigma barunya tetap

---

<sup>6</sup> David Apter, *Pengantar Analisis Politik*, (Jakarta: PT. Publishing Indonesia, 1988), 355-359

menempatkan Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan dasar Negara serta jati diri bangsa yang tidak berubah. Dalam analisis sistem kepartaian, Partai Golkar secara ideologi politik dapat dikelompokkan sebagai “partai tengah” yang berciri moderat dan tidak ekstrim dan berorientasi program.

Hal ini selaras dengan posisi dan titik berat Golkar sejak awal merupakan organisasi sosial politik yang di dalam perjuangannya yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Partai Golkar merupakan partai Nasionalis-inklusif, yang akomodatif dan terbuka terhadap berbagai kelompok sosial didalam masyarakat, termasuk kelompok keagamaan<sup>7</sup>

Lahirnya partai golkar dalam rangka untuk menghadapi ancaman PKI yang gencar menyebarkan paham Komunisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, TNI AD antara lain mendirikan organisasi-organisasi masyarakat yakni Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, guna menghadapi tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan fungsional yang didukung TNI berjuang keras memformalkan kehadirannya, hingga akhirnya keluar Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1959 yang secara resmi mengangkat 200 orang wakil Golongan

---

<sup>7</sup> “ Materi Pendidikan dan Latihan Kader Penggerak Teritorial Desa” Lembaga Pengelola Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta

<sup>8</sup> Patmono Sk, dkk, *Golkar Baru dalam Fakta dan Opini*-Buku I, (Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi, 2001), 16

Karya di MPRS. Kemenangan golongan Fungsional tersebut dalam perkembangannya dipertegas kembali oleh keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 dimana mereka memiliki perwakilan di Front Nasional badan politik yang dibentuk dalam kerangka politik Soekarno yang dimaksudkan untuk mengimbangi partai-partai politik.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), pada tanggal 20 Oktober 1964 (yang kemudian dioperingati sebagai hari lahir Golkar dan Partai Golkar. Pada mulanya Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional, berkembang menjadi 97 federasi/ perhimpunan organ non-afilatif (baik yang bersifat keagamaan maupun non-keagamaan hingga akhirnya menjadi 291 organisasi.

Banyaknya jumlah anggota tersebut dimotivasi oleh kepentingan bersama di dalam menghadapi Komunis dan mempertahankan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, kehadiran Sekber Golkar sebagai cikal bakal Golkar dan Partai Golkar, merupakan wadah bagi organisasi-organisasi yang anti Komunis dalam rangka membela, dan mengamankan, serta mempertahankan ideologi Pancasila. Sebagai kekuatan pembaru yang dapat menjadi alternatif yang berbeda dengan partai-partai politik yang bertumpu pada “ideologi aliran”<sup>9</sup>

Dengan demikian jelas bahwa sejak awal ideologi Golkar adalah Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara, dimana sila-silanya termasuk dalam

---

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/partai\\_Golongan\\_Karya](http://id.wikipedia.org/wiki/partai_Golongan_Karya)

Pembukaan UUD 1945. Golkar hadir untuk membela ideologi lainnya. Dengan mengedepankan ideology Pancasila, maka Golkar tidak mengedepankan ideologi-aliran, melainkan berorientasi pada program dan pembangunan sebagai wujud dari pengalaman Pancasila. Dalam Pemilu 1971 Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang.

Kemenangan ini diulangi pada pemilu-pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar dan untuk pertama kalinya mengikuti pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDIP. Ketidaksiapan terhadap pemerintahan Megawati Soekarno Putri menjadi salah satu sebab para pemilih di pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan lain-lain.

Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada

Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan mendominasi perolehan suara.

Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%. Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakrie. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Muhammad Jusuf Kalla wakil presiden Indonesia 2004–2009.<sup>10</sup>

Jika kita lacak dari fakta historis, di era Orde Baru, PPP hanya dijadikan pelengkap penderita dalam bingkai Demokrasi Pancasila karena jika Demokrasi Pancasila dianggap sebagai demokrasi konsensus yang lahir dari bumi Indonesia, seharusnya PPP dan PDI ketika itu ikut berkuasa dalam menjalankan pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, kedua partai tersebut hanya dijadikan sparing partner yang seolah-olah sudah dipastikan harus kalah.

Keberadaan PPP (juga PDI) pada masa Orde Baru tidak lebih dari sekadar “aksesoris” dalam sistem Demokrasi Pancasila. Aspirasi umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya disumbat dan dikekang dengan berbagai instrument hukum yang mendukung terhadap rezim otoriter. Intervensi Negara terhadap berbagai kehidupan masyarakat termasuk kedalam internal partai politik dapat dilakukan setiap saat.

---

<sup>10</sup> “ Materi Pendidikan dan Latihan Kader Penggerak Teritorial Desa, Lembaga Pengelola Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta

Akibatnya, partai politik tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya seperti yang diharapkan. Dari semua Pemilu yang diikuti, dukungan masyarakat terhadap PPP selalu mengalami penurunan. Selama di bawah kendali struktur politik Orde Baru, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, dukungan masyarakat terhadap PPP menjadi fenomena yang menarik untuk ditelusuri. Demokrasi Pancasila yang dijadikan dalil dan dalih stabilitas politik untuk kelancaran pembangunan telah membelenggu aspirasi rakyat. Rakyat disuguhkan politik hegemonik dengan hanya menampilkan tiga orsospol saja.

Dahsyatnya, politik hegemonik tersebut mewarnai rakyat mulai dari istana sampai ke tingkat RT/RW. Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, satu orsospol harus dimenangkan oleh pemerintah sebagai single majority, sedangkan dua orsospol lainnya (PPP dan PDI) hanya diposisikan sebagai penggembira panggung demokrasi. Pada masa Orde Baru, situasi kondisi politik internal PPP dapat dikategorikan kepada dua fase, yaitu fase berasaskan Islam (1977–1982) dan fase berasaskan Pancasila (1987, 1992, 1997). Kedua fase tersebut telah memberikan nuansa yang signifikan terhadap PPP dan psikologi para pendukungnya.

Sesudah terjadinya fusi tahun 1973, Pemilu pertama yang diikuti PPP tahun 1977 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Partai yang membawa Panji Islam ini berhasil mendapat kepercayaan dengan perolehan suara 18.745.592 (29.29 %) suara dari 64.000.185 pemilih yang terdaftar. Perolehan suara itu meningkat 2,17

% dari total perolehan partai-partai fusi (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) dalam Pemilu 1971.<sup>11</sup>

Dari pemaparan terhadap beberapa pergulatan ideologi politik yang terjadi di Indonesia, sebenarnya Islam sudah lebih dulu memulainya, hal ini bisa kita lihat dalam catatan Sejarah Islam. mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, dimulai dari masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, periode klasik, periode pertengahan hingga masa modern. Jika khazanah itu dikonsepsikan sangat mungkin melahirkan keanekaragaman teori pemikiran politik. Namun yang menarik perhatian -setidaknya di masa periode awal Islam- khazanah itu lebih dominan melahirkan teori-teori firka dalam Islam yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam, bukan melahirkan teori politik, meskipun sesungguhnya akar persoalannya berawal dari pertikaian politik.

Memasuki periode klasik yang ditandai dengan kemapanan yang terjadi di dunia Islam, di masa ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbas (750-1258 M). Secara politis, masa itu Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode Bani Umayyah, kajian fiqh politik (siyasah) masih belum juga muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakan pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah barulah kajian fiqh Siyasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama -sunnī- waktu itu cenderung

---

<sup>11</sup> Syafruddin Amir, *Transformasi Energi PPP Konsolidasi Menuju Partai Sejati*, Bandung, Idea Publishing, 2007, 29

akomodatif dan mendukung kekuasaan. Sementara itu di sisi yang lain syi'ah, khawarij dan mu'tazilah berkembang menjadi kelompok oposisi, walaupun belum memiliki pengaruh kuat. Berdasarkan kenyataan ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa teori politik sunni abad klasik ini cenderung memberi legitimasi terhadap kekuasaan<sup>12</sup>

Di tengah kepentingan-kepentingan golongan. Karena sifat akomodatif itu sunni mendominasi percaturan politik saat itu dan para pemikir politiknya mampu mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan.

Memasuki periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang dikembangkan pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadapkan kepada situasi obyektif. Maka pada periode pertengahan itu lahirlah pemikiran politik yang berbeda dengan sunni periode klasik, yang salah satunya dipresentasikan oleh Ibnu Taimiyah.

Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam makalah ini akan mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan menganalisa latar belakang pemikirannya dengan pendekatan sosiopolitik. Kemudian mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang politik, pemerintahan, kepemimpinan dan hakikat negara, di tengah suasana sejarah yang mengitari pemikirannya, serta relevansi gagasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai cermin

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyarah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 22

dari pemikiran yang lahir di abad modern Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi al-Din Abul Abbas ibn Abd al Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah. Goldziher melukiskannya sebagai “pemilik pribadi paling terkemuka abad ke-7 H”, juga digambarkan sebagai seorang teolog muslim abad ke-13 dan 14 paling kenamaan<sup>13</sup>

Dinamika poliitik di Indonesia, pemikiran tentang Islam politik juga menampakkan wajah yang kompleks. Hal itu bisa dilihat pada masa lalu, yakni abad ke-13 dan abad ke-14, ketika Islam dikenalkan dan disebarluaskan di Indonesia. Bangkitnya gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20 menjadi awal permulaan diskursus Islam politik secara lebih jelas. Pada masa itu, gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan dengan visi politik yang jelas, yakni menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tidak diragukan lagi, dalam gerakan nasionalistik itu Islam memainkan peran penting, bahwa Islam bukan saja mata rantai yang mengikat nasionalisme Indonesia, melainkan juga menjadi simbol kesamaan nasib dalam menentang penjajahan Belanda.<sup>14</sup>

Selanjutnya dari berbagai masalah diatas membuat penulis tertarik untuk di jadikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ideologi politik partai golkar dalam perspektif siyasah syar’iyah.

---

<sup>13</sup> Goldziher, “Ibn Taimiyah”, *Encyclopedia of Religion and Ethics* 7 , 72

<sup>14</sup> Abdul Aziz, *Politik Islam* , Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006, h 23

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terjadinya pergulatan politik yang mengancam ideologi Negara.
2. Depolitisasi politik orde baru.
3. Kurang adanya transparansi atau keterbukaan terhadap public.
4. Ideology politik partai Golkar
5. Persepektif siasyah Syar'iyah terhadap ideologi politik partai Golkar

### **D. Batasan Masalah**

Ada beberapa masalah di atas, tetapi salah satu yang menjadi faktor penyebab lahirnya partai Golkar adalah terjadinya pergulatan politik yang mengancam terhadap ideologi Negara.

Untuk itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebatas untuk mengetahui proses lahirnya ideology politik partai Golkar.

### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ideologi Politik Partai Golkar?
2. Bagaimana Perspektif Siyasyah Syar'iyah Terhadap Ideologi politik Partai Golkar?

## **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ideologi politik partai Golkar.
2. Untuk mengetahui ideologi politik partai Golkar dalam perspektif Siyasyah syar'iyah.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis:
  - a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Siyasyah jinayah terutama dalam kaitanya dengan ideologi partai politik terutama partai Golkar..
  - b. Untuk memperkenalkan ideologi partai Golkar pada khalaya umum.
2. Secara praktis: untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan Ideplogi partai politik yang ada di Indonesia maupun dinegara lain.

## **H. Kajian Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui, kajian terhadap ideologi partai - partai politik khususnya partai Golkar memang belum pernah ada yang membahas atau melakukan penelitian secara langsung yang berhubungan dengan partai politik. Penelitian-penelitian tersebut, pada temanya dapat diklasifikasikan sebagai berikut Pertama, buku yang membahas partai Golkar dalam berbagai aspek, Entah itu dalam bentuk

buku ataupun yang lainnya, salah satunya adalah buku "the Golkar way karya Akbar Tanjung", yang menggambarkan visi misi serta ideologi Golkar dan perjalanannya, serta latar belakang berdirinya secara lengkap dan gamblang. Serta memaparkan ide-ide yang berkenaan dengan politik di Indonesia. Buku tersebut juga memperkenalkan kontribusi Golkar terhadap bangsa.

Kedua, buku karya David Reev yang berjudul "Goslkar: sejarah yang hilang " yang membahas tentang sejarah panjang Golkar. Sejarawan David Reeve menelusuri masa-masa paling awal Golkar yang jarang dibahas. Pada gagasan integralistik kolektivis buah pemikiran Soepomo, Sukarno dan Ki Hadjar Dewantara pada periode 1940-an 1950-an dicari sumber ilham dan pembentuk organisasi-organisasi golongan karya. Tapi, kemunculan Golkar masih harus menunggu sampai sistem partai didiskreditkan pada pertengahan 1950-an.

Disinilah Golkar naik ke panggung politik bersama gagasan Sukarno mengubur partai-partai. Sukarno mendorong menggantikan partai-partai dengan Golkar yang saat itu disebut golongan fungsional dan pada 1959 di-Sansekertakan menjadi Golongan Karya serta diambil alih Angkatan Darat. Tapi, sejak 1959 itu pula gagasan Golkar digunakan Angkatan Darat dan para sekutunya sebagai senjata anti-PKI juga anti-Sukarno. Sukarno jatuh, Suharto memanfaatkan Golkar dalam pemilu. Para aktivis, intelektual, dan pendukung Orde Baru diperintahkan mengambil alih Sekber Golkar dan direstrukturisasi.

Kepemimpinan lama dipinggirkan digantikan kepemimpinan Orde Baru. Golkar diambil alih kembali demi tujuan politik jangka pendek yang berbeda, yaitu

memenangkan pemilu bagi Orde Baru dan merestrukturisasi perpolitikan Indonesia. Golkar memainkan peran ini sampai 1998. Saat itu, Soeharto jatuh tapi Golkar tak tersapu. Malahan muncul jadi salahsatu kekuatan politik utama dalam pemilu Indonesia 1999, 2004 dan 2009. Era baru Golkar yang jauh dari gagasan asli, yaitu memenangkan gagasan partai, mengalahkan gagasan anti-partai. Tokoh-tokoh militer pun pergi dan sekelompok pengusaha mengambil alih kepemimpinan.

Ketiga, sebuah buku yang berjudul " Politik Islam Politik " karangan Abdul Aziz, kemudin buku yang berjudul "Fiqih Siyasyah" karya M Iqbal, dan karya Farid Abdul Khaliq yang berjudul "Fikih Politik Islam" buku- buku ini secara keseluruhan membahas tentang politik islam, baik secara historis, ideologis dan perjalanannya. Sebagai bahan pendukung terhadap teori ideologi partai Golkar perspektif Siyasyah syar'iyah.

## **I. Definisi Operasional**

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam sosial-politik. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian-pengertian, dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.<sup>15</sup>

Politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau negara kota sedangkan teta berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan

---

<sup>15</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Disusun Berdasarkan GBPD dan SAP (Yogyakarta: Paradigma, 1996), 35

negara (pemerintahan). Berikut ini beberapa definisi politik dan ilmu politik yang dikemukakan oleh para ahli.

Golkar atau Golongan Karya, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Sebelum menjadi Partai politik, Golkar atau golongan karya adalah organisasi masyarakat (ormas) yang didirikan atas nama sekretariat bersama (sekber) Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap kehidupan politik di tanah air. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi golongan karya yang masuk salah satu organisasi peserta pemilu.<sup>16</sup>

Siyasyah Syar'iyah Secara sederhana Siyasyah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khalaf merumuskan Siyasyah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>17</sup>

## **J. Metode Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan corak ideologi politik partai Golkar dalam perspektif siyasyah syar'iyah dengan menggunakan metode analisis

---

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/partai\\_Golongan\\_Karya](http://id.wikipedia.org/wiki/partai_Golongan_Karya)

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h 15

kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan diatas,berikut beberapa aspek metodologis yang digunakan dalam penyusunan:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku,majalah ,dokumen,dan karya-karya yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis,yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan melalui proses analisis.penelitian dekriptif bertujuan untu mendiskripsikan apa – apa yang saat ini berlaku.didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan mencata, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di tempuh dalam penelitian ini adalah:normatif-historis. Pendekatan normati di sini adalah sebuah upaya untuk mengetahui idelogi politik paratai Golkar. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasyah syar'iyah terhadap ideology politik partai Golkar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini,yaitu,yang pertama pengumpulan buku-buku,literatu,serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.yang kedua klarifikasi data,usaha umtuk memilah data agar dapat

mempermudah memahami data;ketiga interpretasi data,data yang sudah di klarifikasi kemudian di interpretasikan sesuai kebutuhan penyusun. data dalam penelitian ini di klarifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer.(utama ) mengkaji sumber data primer berupa buku yang berjudul Akbar Tanjung. *The Golkar Way*. Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2007.

1) David Reeve, *Golkar: Sejarah Yang Hilang*, Bandung, Komunitas Bambu 2012.

b. Sumber Data Sekunder

1) Abdul Aziz, *Politik Islam Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006.

2) Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.

3) Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1993.

4) Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005.

## 5. Analisi Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data supaya diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini dengan menggunakan penalaran deduktif. Deduktif merupakan langkah menganalisis data yang menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta bumi aksara 1990), hal 26

## **K. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latarbelakang masalah yang dikaji. Hal ini juga merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab berikutnya. Dalam hal ini meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Landasan teori, pembahasan tentang ideologi politik partai Golkar, Teori tentang Siyasyah syar'iyah, sejarah, serta aspek aspek yang berkaitan tentang Siyasyah syar'iyah.
- BAB III : Ideologi politik partai Golkar, visi misi, sejarah perjalanan partai Golkar serta latar belakang berdirinya.
- BAB IV : Analisis terhadap ideologi politik partai Golkar dalam perspektif Siyasyah syar'iyah.
- BAB V : Penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.